

Judul : Pansus Minta Ditjen Pajak Telusuri Rumah Sekap
Tanggal : Senin, 07 Agustus 2017
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 11

Pansus Minta Ditjen Pajak Telusuri Rumah Sekap

[JAKARTA] Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di DPR benar-benar serius menelusuri dugaan adanya rumah sekap yang digunakan lembaga oknum lembaga antirasuah itu untuk mengarahkan kesaksian.

Walaupun Juru Bicara KPK Febri Diansyah sudah meminta agar Pansus bisa membedakan antara rumah sekap dan rumah aman (*safe house*), anggota Pansus

tetap akan mengklarifikasi. Selain berniat mengunjungi langsung lokasi rumah sekap yang didasari pengakuan yang masuk, Pansus juga berniat menyuarati Ditjen Pajak.

"Kita minta Ditjen Pajak periksa KPK supaya minta bukti faktur pajak PPN dan bukti potong PPh Pasal 23 atas sewa yang diklaim *safe house* atau yang diakui sebagai rumah sekap," kata anggota Pansus Hak Angket

KPK M Misbakhun, Minggu (6/8).

Sebelumnya, keberadaan rumah sekap itu diungkap Niko Panji Tirtayasa di depan Pansus Angket KPK. Niko mengaku disekap di sebuah rumah oleh penyidik. Niko juga menyebut rumah sekap itu untuk mengondisikan saksi agar menuruti keinginan penyidik KPK.

Ia menyebutnya rumah sekap karena selama di sana, dia tak bisa berhubung-

an dengan pihak luar termasuk keluarga. Ia dijaga ketat oleh anggota kepolisian dari satuan Brimob. Niko juga mengaku dipaksa memberikan keterangan sesuai arahan penyidik KPK dengan iming-iming uang dan liburan mewah menggunakan jet pribadi, serta pembagian harta sitaan milik Muchtar Effendi.

Misbakhun meminta KPK tidak bersikap defensif. Sebab, bisa saja nanti mun-

cul dugaan KPK berusaha menutupi sesuatu yang kurang layak diketahui publik. Dikatakan, Pansus Hak Angket KPK berkomitmen dan bertanggung jawab mengungkap kebenaran. "Apakah KPK memang benar-benar sebuah lembaga yang baik atau hanya sekadar sebuah lembaga yang sedang melakukan pencitraan KPK? Ini yang kita evaluasi," kata dia.

Sebelumnya, Febri me-

nyatakan, isu rumah sekap itu menyeruak karena saat ini ada pihak yang cemas soal pernyataan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin yang membuka peran banyak pihak dalam sejumlah perkara korupsi.

Febri menegaskan, KPK tak terlalu peduli dengan tuduhan tak mendasar. KPK juga tidak akan ciut atau kendur dalam menangani perkara korupsi. [MJS/Y-4]